

Kumawula, Vol.9, No.1, April 2026, 23 – 30  
DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v9i1.60858>  
ISSN 2620-844X (online)  
ISSN 2809-8498 (cetak)  
Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

## PENGUATAN INSTITUSI KELOMPOK TANI HUTAN KEMASYARAKATAN: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA

Rijal Ramdani<sup>1\*</sup>, Dicky Dwi Radhica<sup>2</sup>, Desi Riza Ayu Koma<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>2</sup> Magister Ketahanan Energi, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>3</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

\*Korespondensi : [rijalramdani@umy.ac.id](mailto:rijalramdani@umy.ac.id)

### ABSTRACT

*The Community Forest Policy provides an opportunity for the Sedyo Makmur Forest Farmers Group in Gunungkidul District, Yogyakarta, to manage 115 hectares of state-owned forest for 30 years. However, based on observations and interviews, we found that (1) the Sedyo Makmur Forest Farmer Group did not yet have adequate managerial and administrative systems; (2) it was not able to meet the administrative requirements to apply for a permit (Timber Forest Product Utilization Business License (IUPHHK HKm)); (3) it did not yet understand the sustainable logging system; and (4) it has limited capacity to sell forest products. Through this community service program, we assisted the Sedyo Makmur group by providing: (1) education to the management and members of the forest farmer group on administrative preparation, organizational governance, and building organizational networks; (2) training on the administrative system for applying for HKm IUPHHK permits in accordance with regulations; (3) preparation of the Felling Plan and Annual Work Plan; (4) data collection and calculation of timber potential; (5) counseling on sustainable forest timber harvesting systems in accordance with the principles of sustainable forestry; and (6) training on timber product marketing systems through networking with the timber industry. We expected to strengthen Sedyo Makmur's institutional capacity so that it can become a productive institution capable of managing forests sustainably and obtaining logging rights through an appropriate marketing system. The results of this community service activity show that members of the Sedyo Makmur group have gained a better understanding of the materials delivered during the program. This understanding has been implemented through improvements in administrative management, organizational governance, and timber logging practices in accordance with established procedures. However, the group still faces challenges in marketing timber products, particularly in utilizing digital technology and online platforms for broader market access.*

**Keywords:** Forest; forest farmer group; timber; stakeholders; community service

### ABSTRAK

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan memberikan kesempatan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur di Kabupaten Gunungkidul,

### RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 16/01/2025  
Diterima : 13/03/2026  
Dipublikasikan : 01/04/2026

D.I. Yogyakarta, untuk mengelola hutan milik negara seluas 115 hektar selama 30 tahun. Namun, berdasarkan pengamatan dan wawancara, (1) KTH belum memiliki sistem manajerial dan administrasi yang memadai; (2) belum mampu memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan izin (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HKm); (3) belum memahami sistem penebangan lestari; dan (4) belum memiliki kemampuan untuk memasarkan hasil hutan. Melalui program pendampingan ini, Tim Pengabdian kepada Masyarakat mendampingi Sedyo Makmur dengan memberikan 1) edukasi kepada pengurus dan anggota kelompok tani hutan dalam penyiapan administrasi, tata kelola organisasi, dan membangun jejaring organisasi; 2) pelatihan sistem administrasi pengajuan izin IUPHHK HKm yang sesuai dengan peraturan; 3) penyusunan Rencana Tebang dan Rencana Kerja Tahunan; 4) pendataan dan penghitungan potensi kayu; 5) penyuluhan sistem pemanenan kayu hutan lestari sesuai dengan prinsip-prinsip kehutanan lestari; dan 6) pelatihan sistem pemasaran produk kayu melalui jejaring dengan industri perikanan. Tim Pengabdian Masyarakat diharapkan dapat memperkuat kelembagaan Sedyo Makmur sehingga Sedyo Makmur dapat menjadi lembaga yang mandiri, mampu mengelola hutan secara lestari, dan memperoleh hak penebangan melalui sistem pemasaran yang tepat. Hasil dari pengabdian ini adalah KTH Sedyo Makmur bisa memahami materi yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk pembuatan administrasi, tata kelola organisasi dan penebangan kayu sesuai prosedur. Namun, dalam hal pemasaran kayu dengan cara memanfaatkan teknologi, mereka masih mengalami kesulitan.

**Kata Kunci:** Hutan; kelompok tani hutan; kayu; stakeholders; pengabdian masyarakat

## PENDAHULUAN

Hutan menjadi salah satu aset penting yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia menduduki peringkat ke-8 dengan hutan terluas di dunia (Rao, 2024). Luas hutan Indonesia kini mencapai 105,86 juta hektare (Yonatan, 2024). Di samping itu, kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan pelbagai macam seperti, wisata, suaka alam, edukasi, dan pemanfaatan hasil kayu. Namun, permasalahan pemanfaatan hutan di Indonesia ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, alasan ekonomi, dorongan untuk meningkatkan pendapatan nasional mendorong pemerintah memberikan hak pemanfaatan hutan kepada industri (Casson & Obidzinski, 2002). Kedua, alasan sosial dan budaya, fenomena peladang berpindah, dimana masyarakat melakukan pembakaran hutan untuk menjadi tempat tinggal. Kemudian, pindah ke wilayah lain ketika tanah tersebut sudah tidak subur kembali (Lawrence et al., 2010; Schulte & Sah, 2000). Ketiga, alasan *the struggle of life*, masyarakat melakukan pembalakan hutan karena mereka

membutuhkan hasil hutan agar mereka mampu bertahan hidup semata (Lawrence et al., 2010; Schulte & Sah, 2000).

Deforestasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan kerugian sebesar 2 Miliar dalam bentuk pajak yang tidak terbayar, dan lebih dari lima puluh persen disebabkan oleh aktivitas ilegal (Food and Agriculture Organization, 2007; Human Rights Watch, 2009). Maka dari itu, baik penebangan legal dan ilegal di Indonesia menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih, industri kehutanan di Indonesia selalu terkait dengan korupsi, penghindaran pajak, dan kebakaran hutan yang menyebabkan negara rugi baik secara ekonomi dan lingkungan (Human Rights Watch, 2009).

Permasalahan yang muncul pemanfaatan hutan tersebut harus segera diselesaikan. Solusi yang harus dilakukan adalah bagaimana negara mampu membuat kebijakan untuk mendistribusikan sumber daya hutan secara adil pada komunitas. Di samping itu juga, mampu menciptakan hutan yang lestari atau berkelanjutan (Aqilla, 2024). Pada sisi

komunitas atau institusi lokal dibutuhkan kesadaran dan kemampuan mereka membangun institusi lokal yang kuat untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari (Alimuna & Srifitriani, 2022) karena institusi lokal yang mampu melakukan adaptasi pada lingkungan akan mampu menjaga hutan tetap lestari (Ostrom, 2009). Patut disadari bahwa setiap lokal institusi memiliki karakteristik sesuai dengan konteks dan budaya setempat yang wajib diketahui (Indrawati et al., 2024).

Di tahun 1980an hutan yang berada di Dusun Jragum, Desa Ngeposari, Blok 161 dan 162 BDH Karangmojo, Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul, dirambah oleh masyarakat dengan melakukan penebangan terhadap pohon-pohon jati untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan arang. Akibatnya kondisi hutan semakin hari semakin gundul dan kering, pemandangan yang terlihat sangat gersang, dan apabila dibiarkan akan berakibat pada kelangkaan air. Atas keprihatinan itulah sejak tahun 1985 muncul inisiatif dari masyarakat untuk berupaya melakukan pelestarian hutan, dimulai dengan terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) yang beranggotakan 100 orang anggota (Ramdani, 2016). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pertemuan rutin setiap Senin Legi, serta penanaman sono, akasia, cendana, dan jati. Aktivitas kelompok itu tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya bimbingan Mantri Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY.

Ketika kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) digulirkan tahun 1995, KTH Sedyo Makmur, memiliki keberanian untuk memproses perizinan pengelolaan hutan dengan mendapatkan pendampingan dari Mantri Kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Shorea dalam pelatihan pengurusan dokumen. Barulah di tahun 2003 Bupati Gunung Kidul atas pelimpahan kewenangan dari Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 31/Kpts-II/2001, menerbitkan SK Bupati No. 213/KPTS/2003 tentang penyelenggaraan HKm (Setiawan, 2017). Perizinan ini memberikan kepada 35

kelompok, salah satunya adalah KTH Sedyo Makmur (Purnomo, 2019). Kemudian, barulah KTH Sedyo Makmur mendapatkan izin definitif turun pada tahun 2007, melalui SK IUPHKM No. 214/KPTS/2007 (Java Learning Center, 2019). Di tahun 2007 juga, berdiri Koperasi Sedyo Makmur sebagai tempat simpan pinjam bagi anggota KTH dan non-KTH, dan sebagai prasyarat dalam pengajuan Izin Usaha Hasil Hutan Kayu HKm (IUPHHK).

Kebijakan HKm memberikan kesempatan kepada KTH Sedyo Makmur untuk mengelola hutan milik negara dengan berasaskan pada kelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat. Kelestarian hutan dilakukan dengan cara menanam tanaman hutan (jati). Sementara aspek kesejahteraan diperoleh dengan mendapatkan hak melakukan penanaman tanaman tumpang sari dan menebang hasil hutan kayu setelah usia 15 tahun (Budiadi et al., 2023).

Tahun 2015, mengingat usia dari tanaman pokok sudah 20 tahun, KTH Sedyo Makmur mengajukan IUPHHK HKm dengan dokumen-dokumen sebagaimana yang diperlukan. Akan tetapi kewenangan dalam memberikan izin beralih dari Kementerian Kehutanan ke Provinsi, dan peraturan perundangan yang mengalihkan kewenangan dalam pengajuan IUPHHK HKm dari Koperasi kembali ke KTH dengan syarat-syarat administrasi yang berubah dan menyulitkan. Kesulitan tersebut membuat KTH harus memiliki perencanaan penebangan, peta kawasan, pendataan jumlah dan diameter kayu, dan sistem pemasaran. Ditambah dengan aspek keberlanjutan, di mana KTH Sedyo Makmur pun harus tetap menjaga ekosistem hutan dengan melakukan sistem penebangan hutan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, KTH Sedyo Makmur pun tidak lagi mendapatkan pendampingan baik dari LSM maupun dari Dinas Kehutanan. Sehingga pendampingan terhadap KTH ini sangat diperlukan untuk membangun kemampuan mereka secara mandiri di dalam proses pengajuan administrasi dan juga dalam

pemasaran hasil hutan kayunya. Melalui Program Kemitraan Masyarakat ini, diharapkan bisa menjembatani dalam penguatan institusi KTH, bisa memfasilitasi pemenuhan prasyarat IUPHHK HKm dan bisa membantu KTH dalam melakukan analisis pemasaran dari hasil hutan kayunya.

## METODE

### Metode Pengambilan Data

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Gunung Kidul, Yogyakarta, khususnya di Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur. KTH Sedyo Makmur merupakan kelompok yang berlokasi di Desa Ngeposari dan Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Anggota kelompok ini berasal dari empat dusun, yaitu Dusun Jragum, Wediutah, dan Gemulung di Desa Ngeposari serta Dusun Plebengan di Desa Candirejo. Jumlah anggota KTH adalah 254 orang yang terbagi ke dalam tujuh subkelompok dengan total luas lahan kelola sekitar 115 hektare. Rata-rata usia anggota KTH adalah 30 – 65 tahun. Kawasan tersebut berada pada petak 161 dan 162 di wilayah RPH Semanu, BDH Karangmojo, yang berstatus sebagai hutan produksi (Ramdani, 2016).

Sebagian besar anggota mengelola lahan dengan luas relatif kecil, umumnya kurang dari satu hektar per orang. Akan tetapi di pedesaan Jawa luas lahan tersebut sangat berarti bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian. Pada lahan tersebut, anggota kelompok mengembangkan pola agroforestri dengan menanam tanaman kehutanan seperti jati, akasia, sono, dan cendana yang dikombinasikan dengan tanaman pertanian dan tanaman sela sesuai kebutuhan rumah tangga petani, sehingga mendukung fungsi produksi sekaligus keberlanjutan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) (Ramdani, 2016).

Metode pengambilan data dalam pengabdian ini adalah menggunakan teknik observasi dan wawancara ke beberapa *stakeholders*, ketua KTH Sedyo Makmur dan Kepala Dukuh Jragum (Gambar 1). Setelah

mendapatkan data, penulis melakukan analisis data untuk memetakan bagaimana langkah-langkah kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan di Gunung Kidul.



**Gambar 1. Proses Pengambilan Data**  
(Sumber: Penulis, 2025)

### Metode Pelaksanaan

Hasil dari analisis data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara kepada Ketua KTH Sedyo Makmur dan Kepala Dukuh Jragum, penulis memiliki beberapa tahapan kegiatan pengabdian, yakni:

**Pertama**, melakukan persiapan dari mulai mencari data, koordinasi, dan membuat rancangan kegiatan bersama mahasiswa dan kelompok tersebut agar mendapatkan kesepahaman dan mencapai target yang diinginkan

**Kedua**, melakukan edukasi dan pendampingan kepada pengurus dan anggota KTH dalam penyusunan administrasi, tata kelola organisasi, dan membangun jejaring bagi organisasi.

**Ketiga**, melakukan pelatihan sistem administrasi pengajuan izin IUPHHK HKm sesuai dengan peraturan perundangan. (1) Penyusunan Rencana Tebang. (2) Penyusunan RKT Tahunan, (3) Sistem Pendataan dan Penghitungan potensi hasil kayu.

**Keempat**, melakukan edukasi sistem penebangan hasil hutan kayu yang berkelanjutan untuk mempertahankan

ekosistem hutan sesuai dengan prinsip hutan lestari.

**Kelima**, pelatihan sistem pemasaran hasil hutan kayu, baik dengan membangun jaringan dengan industri kayu maupun dengan pihak-pihak lainnya.

Dalam ketiga pelatihan tersebut, yaitu tata kelola organisasi, sistem administrasi IUPHHK HKm, penebangan hasil hutan kayu, dan pemasaran hasil hutan kayu, 15 pengurus KTH dan anggota menjadi peserta.

**Keenam**, monitoring dan evaluasi (MONEV) merupakan bagian terpenting dari akhir pengabdian masyarakat ini karena adanya monev dapat memantau apakah kelompok tersebut dapat berjalan secara mandiri setelah perginya tim pengabdian.



**Gambar 2. Mengecek Lahan Tani Kayu bersama Mahasiswa dan Masyarakat**  
(Sumber: Penulis, 2025)

Dalam pengabdian ini, tentunya pendampingan dan pendidikan terhadap anggota KTH Sedyo Makmur tersebut akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dari latar belakang jurusan yang berbeda seperti, prodi Teknologi Informasi, prodi Pertanian, dan prodi Pemerintahan sehingga dapat memberikan masukan kepada masyarakat secara optimal sesuai dengan bidang yang dikuasai (Gambar 2). Selain itu sangat penting untuk melakukan kerjasama dari NGO, Dinas Kehutanan, Desa, dan Karang Taruna setempat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelompok Tani Hutan Sedyo Makmur dalam pengelolaan organisasi sebagai berikut:

### Persiapan

Kegiatan yang pertama dilakukan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah melakukan persiapan. Tim KKN melakukan persiapan dengan cara koordinasi dengan pengelola organisasi. Hal ini dilakukan agar menemukan kesamaan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Setelah melakukan persiapan, tim pengabdian masyarakat melakukan penyusunan beberapa kegiatan, yakni edukasi dan pendampingan tata kelola organisasi, pelatihan sistem administrasi, edukasi sistem penebangan hasil hutan kayu, dan pelatihan sistem pemasaran kayu.

Berdasarkan kegiatan ini, hasil yang dicapai adalah terbentuknya timeline kegiatan dan materi edukasi yang terstruktur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### Edukasi dan Pendampingan Tata Kelola Organisasi

Edukasi dan pendampingan tata kelola organisasi sangat penting bagi suatu organisasi. Tujuan dari ini, agar dapat menciptakan organisasi yang memiliki tata kelola dan manajemen yang baik. Dengan adanya hal itu, organisasi dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Dalam kegiatan ini, tim pengabdian masyarakat memberikan materi terkait prinsip-prinsip tata kelola organisasi, seperti akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kegiatan ini dilaksanakan di sore hari. Hal ini dikarenakan mayoritas anggota memiliki aktivitas di pagi hingga siang.

Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi ke dalam struktur keorganisasiannya. Hal ini dibuktikan dengan perubahan struktur organisasi dan anggota divisi.

### Pelatihan Sistem Administrasi

Pelatihan administrasi bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi administrasi secara efisien dan efektif. Dengan memiliki sistem administrasi yang baik dalam organisasi, maka organisasi itu dapat berjalan dengan baik.



**Gambar 3. Penyerahan Alat Administrasi**  
(Sumber: Penulis, 2025)

Dalam kegiatan ini, tim pengabdian memberikan edukasi terkait bagaimana membuat sistem administrasi yang baik dan memberikan bantuan alat administrasi (Gambar 3). Selama kegiatan, anggota KTH Sedyo Makmur dapat memahami dan mengikuti materi dengan baik.

Berdasarkan hasil dari kegiatan ini, KTH Sedyo Makmur mengimplementasikan atas materi yang didapat. Hal ini dibuktikan dengan pembukuan, pengarsipan dokumen, dan menyusun lembar kerja. Tentunya, dalam pembuatan administrasi tersebut didampingi oleh pemateri dan mahasiswa.

### Edukasi Sistem Penebangan Hasil Hutan Kayu

Penebangan kayu yang berkelanjutan dan bertanggung jawab adalah kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan mendukung industri kayu yang berkelanjutan.

Edukasi sistem penebangan kayu ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penebangan kayu secara efisien, aman, dan berkelanjutan (Gambar 4).



**Gambar 4. Pengecekan dan Edukasi Kayu Bersama Warga**  
(Sumber: Penulis, 2025)

Dalam kegiatan ini, tim pengabdian melibatkan *stakeholders* lainnya, seperti Dinas Kehutanan untuk memberikan materi bagaimana sistem penebangan kayu yang efektif. Tentunya, pemateri tersebut merupakan orang yang ahli dalam cara melakukan penebangan hasil kayu.

Berdasarkan hasil dari agenda ini, kelompok sasaran dapat mengimplementasikan materi-materi yang telah disampaikan. Sehingga, kelompok dapat menebang kayu sesuai prosedur.

### Pelatihan Sistem Pemasaran Hutan Kayu

Pelatihan sistem pemasaran kayu bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan memasarkan produk kayu secara efektif (Gambar 5). Pelatihan ini mencakup berbagai aspek mulai dari pemahaman pasar, strategi pemasaran, hingga penggunaan teknologi dan alat pemasaran modern.



**Gambar 5. Pelatihan Pemasaran Hutan Kayu**

(Sumber: Penulis, 2025)

Dalam agenda ini diisi oleh pemateri yang tentunya memiliki pemahaman tentang bagaimana sistem pemasaran kayu (Gambar 5). Hal ini dilakukan agar para anggota KTH Sedyo Makmur mengetahui bagaimana cara menjual kayu mereka secara efektif dan dapat dijangkau secara luas oleh para konsumen, serta dapat bersaing dengan para penjual kayu lainnya.

Hasil pelatihan ini adalah kurang memuaskan karena mayoritas anggota KTH Sedyo Makmur adalah kaum tua. Mereka kesulitan memahami dan menggunakan teknologi. Hal ini menjadi tantangan karena mengingat di era ini semua sudah menggunakan teknologi untuk dapat mengekspansi bisnis.

#### **Monitoring dan Evaluasi (MONEV)**

Kegiatan monev merupakan akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan adalah masyarakat KTH Sedyo Makmur membutuhkan pendampingan yang lebih lanjut dikarenakan mereka membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memahami materi. Pasalnya,

mayoritas anggota kelompoknya adalah kaum tua.

Kemudian, hasil dari monev ini juga bahwa KTH Sedyo Makmur dapat dijadikan mitra kerja sama oleh pelbagai *stakeholders* untuk mengembangkan kelompok KTH, di mana dapat melibatkan kaum muda untuk terlibat dalam agenda atau bergabung secara ke organisasian. Sehingga, nantinya terdapat sistem yang melahirkan regenerasi dalam organisasi.

#### **SIMPULAN**

Kegiatan pemberdayaan ini mengedepankan konsep kerja sama dengan pelbagai *stakeholders* agar dapat menyelesaikan masalah yang ada, sekaligus memberikan manfaat signifikan bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur. Permasalahan utama dalam kelompok ini adalah tata kelola organisasi, administrasi, dan cara penebangan kayu. Oleh karena itu, tim pemberdayaan masyarakat membuat kegiatan yang bersifat memberikan edukasi dan pelatihan seperti tata kelola organisasi, administrasi, penebangan kayu, dan pemasaran kayu menjadi komponen penting untuk mencapai organisasi yang dapat berjalan secara mandiri. Harapannya, adanya kegiatan pemberdayaan ini memberikan dampak dalam kestabilan organisasi dan perekonomian bagi para anggota KTH Sedyo Makmur.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alimuna, W., & Srifitriani, A. (2022). Peran Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Hutan Nanga-Nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Georafflesia*, 7(1), 104–110.
- Aqilla, A. R. (2024). Perhutanan Sosial: Memberdayakan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 437–440.
- Budiadi, Wiyono, Lestari, L. D., Sofiyulloh, M., & Suyanto. (2023). *Tumpangsari dan*

- Hutan Rakyat: Dinamika Budidaya Kayu dan Pangan Petani Jawa* (Vol. 2).
- Casson, A., & Obidzinski, K. (2002). From New Order to Regional Autonomy: Shifting Dynamics of “Illegal” Logging in Kalimantan, Indonesia. *World Development*, 30(12), 2133–2151. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00125-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00125-0)
- Food and Agriculture Organization. (2007). *State of The World's Forests*. Rome, Italy.
- Human Rights Watch. (2009). *Indonesia: Kerugian akibat korupsi sektor perikanan*. [Www.Hrw.Org](http://www.Hrw.Org). <https://www.hrw.org/id/news/2009/11/30/238356>
- Indrawati, S., Abduh, M., Maulidya, A. P., Nurcholifia, S., & Arrahmaniyah, S. (2024). Kearifan Lokal dan Ketaatan Adat: Studi Kualitatif tentang Kebudayaan dan Sistem Pemerintahan di Kampung Naga. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(4).
- Java Learning Center. (2019). *Tebang Wiwitan HKM*. [Javlec.Org](http://javlec.Org). <https://javlec.org/tebang-wiwitan-hkm/>
- Lawrence, D., Radel, C., Tully, K., Schmook, B., & Schneider, L. (2010). Untangling a Decline in Tropical Forest Resilience: Constraints on the Sustainability of Shifting Cultivation across the Globe. *Biotropica*, 42(1), 21–30. <http://www.jstor.org/stable/27742858>
- Ostrom, E. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>
- Purnomo, H. (2019). *Dinamika Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ramdani, R. (2016). Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 01(02), 118–131.
- Rao, P. (2024). *Which Countries Have the Largest Forests?* [Www.Visualcapitalist.Com](http://www.Visualcapitalist.Com). <https://www.visualcapitalist.com/which-countries-have-the-largest-forests/>
- Schulte, A., & Sah, S. (2000). Historie Shift towards Silviculture by People in Asia A Review and Country Case Studies on Community based Forest Management from Nepal, the Philippines and Indonesia. *Die Bodenkultur*, 51(4), 291–298.
- Setiawan, W. (2017). *Evaluasi Keberhasilan Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul dalam Mencapai Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan*. Institut Teknologi Bandung.
- Yonatan, A. Z. (2024). *Berapa Luas Hutan di Indonesia pada 2024?* Goodstats.Id. <https://goodstats.id/article/berapa-luas-hutan-di-indonesia-pada-2024-5p8qr>